

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan di Indonesia periode 2011–2024 menggunakan metode *Two Stage Least Squares* (2SLS), dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan dan kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi masih cenderung terkonsentrasi pada kelompok masyarakat tertentu sehingga manfaat pembangunan belum dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia selama periode penelitian belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Pada persamaan ketimpangan pendapatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sebaliknya, kemiskinan dan *Misery Index* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat kemiskinan, inflasi, dan pengangguran berkontribusi terhadap meningkatnya kesenjangan distribusi pendapatan di Indonesia. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum mampu menciptakan pemerataan pendapatan, sedangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat ketimpangan.

Selanjutnya, pada persamaan kemiskinan diperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Sebaliknya, ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi ketimpangan pendapatan maka semakin besar pula tingkat kemiskinan yang terjadi akibat terbatasnya akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap sumber daya ekonomi. Di sisi lain,

Indeks Demokrasi Indonesia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas demokrasi mampu mendukung penurunan tingkat kemiskinan melalui tata kelola pemerintahan yang lebih baik, peningkatan partisipasi masyarakat, serta kebijakan publik yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu mengarahkan kebijakan pembangunan tidak hanya pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga pada pemerataan distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan.
2. Pemerintah perlu menjaga stabilitas ekonomi, khususnya melalui pengendalian inflasi dan pengangguran tingkat pengangguran, karena peningkatan *Misery Indeks* terbukti memperburuk ketimpangan pendapatan.
3. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan agar kebijakan pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.
4. Pemerintah perlu memperkuat program pemerataan pembangunan antar wilayah, terutama di daerah yang masih memiliki tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang tinggi, sehingga manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan, seperti investasi, belanja pemerintah, tingkat pendidikan, upah minimum, atau tingkat urbanisasi agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

5.3 Keterbatasan Studi

Penelitian ini telah dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian, namun masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan

dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan data panel tingkat provinsi di Indonesia periode 2011–2024 sehingga belum mampu menggambarkan kondisi pada tingkat kabupaten/kota yang memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang lebih beragam. Kedua, variabel yang digunakan masih terbatas pada pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), *Misery Index*, dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), sehingga faktor-faktor lain seperti investasi, pengeluaran pemerintah, tingkat pendidikan, upah minimum, urbanisasi, dan infrastruktur yang juga berpotensi mempengaruhi hubungan antar variabel belum dimasukkan ke dalam model penelitian. Ketiga, meskipun penelitian ini menggunakan metode *Two Stage Least Squares* (2SLS) untuk mengatasi permasalahan endogenitas, hasil estimasi tetap bergantung pada ketepatan spesifikasi model serta pemilihan variabel instrumen yang digunakan. Selain itu, pengukuran kualitas demokrasi hanya menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang bersifat agregat sehingga belum sepenuhnya mampu merepresentasikan seluruh dimensi demokrasi.

Penelitian ini juga mencakup periode pandemi *COVID-19* yang menimbulkan guncangan ekonomi dan sosial, sehingga hubungan antar variabel yang diperoleh perlu diinterpretasikan dengan mempertimbangkan dampak pandemi tersebut. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan cakupan wilayah yang lebih luas, menambahkan variabel-variabel yang relevan, serta mengembangkan metode analisis yang lebih komprehensif agar mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan demokrasi di Indonesia.

